

**KATA PENGANTAR**

uji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku referensi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Buku MONOGRAPH ini merupakan hasil abstraksi dari sejumlah studi empris khusus untuk ***bidang kajian Manajemen Keuangan Perusahaan,*** sehingga buku ini akan sesuai untuk dipergunakan bagi siapa saja yang saat ini sedang **melakukan riset**, pada bidang ***CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT***. khususnya mengenai kinerja keuangan ynag terkait dengan perhatian fihak manajemen terhadap kelestarian lingkungan. judul buku monograph ini adalah ***GREEN FINANCIAL MANAGEMENT*: MODEL SOLUSI MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN BERKELANJUTAN.**

**P**

Terimakasih disampaikan kepada Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp. MS.i M.Kom sebagai Rektor Universitas Pasundan serta rekan-rekan sejawat di Rektorat Unpas Bandung, Dr. Yudi garnida ST MT dan Dr. Deden Ramdhan M.Si atas kerjasama tim-nya serta masukan konstruktif, juga saya sampaikan ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Unpas Dr Atang Hermawan S.E. MSIE C.A atas dorongan dan bantuan selama ini juga rekan sejawat Wakil Dekan-1 FE Dr H. Juanim S.E. MS.i dan ketua Program Studi Manajemen FE Unpas, Wasito S.E., MSIE dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian ***buku monograph*** ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini ,untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan **buku monograp** ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi maanfaat bagi mahasiswa dan rekan sejawat para Dosen khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan tambahan materi analisis berdasarkan hasil kajian empiris.

Bandung, Januari 2018

Penulis

**Dr. H. Jaja Suteja S.E., MS.i CFRM. DBA**

**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
| **KATA PENGANTAR** ........................................................... | i |
| **DAFTAR ISI** .......................................................................... | iii |
| **DAFTAR TABEL** ................................................................. |  |
| **DAFTAR GAMBAR** ............................................................. |  |
|  |  |
| **BAB 1 PENDAHULUAN** ..................................................... | 1 |
| 1.1 Kegiatan Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat .............. | 1 |
| 1.2 Permasalahan Ekonomi Sosial dan Lingkungan ............... | 3 |
|  |  |
| **BAB 2 LITERATUR REVIEW** ........................................... | 9 |
| 2.1 Model Ekonomi Hijau *(Green Economy Model)* .............. | 9 |
| 2.2 Model Bisnis Hijau *(Green Business Model)* ................... | 15 |
| 2.3 *Stakeholders* atau *Stockholders* ......................................... | 19 |
| 2.4 Triple Bottom Line (TBL) ................................................ | 22 |
| 2.5 Maksimisasi Nilai Perusahaan *(Maximization Value of the firm)* ............................................................................ | 23 |
| 2.6 Singkronisasi Tujuan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (*Synchronization of The objective of Economic, Social and Environment*) ............................................................. | 25 |
| 2.7 Manajemen Keuangan Berbasis *Green (Green Financial management*) .................................................................... | 27 |
|  |  |
| **BAB 3 MODEL MANAJEMEN KEUANGAN HIJAU** .... | 35 |
|  |  |
| **BAB 4 PARADIGMA BARU KINERJA KEUANGAN BERKELANJUTAN** ................................................ | 47 |
| 4.1 *Green finance* dan *Green Financial management* ............ | 47 |
| 4.2 Kinerja Keuangan Berkelanjutan (*sustainable financial performance*) ..................................................................... | 50 |
| 4.3 Landasan Aktivitas Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan .................................................................... | 54 |
| 4.4 Roadmap Kinerja Keuangan Berkelanjutan ....................... | 55 |
| 4.5 Pembangunan berkelanjutan atau ekonomi berkelanjutan | 57 |
| BAB 5 SIMPULAN | 59 |
|  |  |
| **DAFTAR PUSTAKA** ............................................................ | 63 |

**DAFTAR TABEL**

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 1. Indikator Penilaian Proper di Indonesia .................... | 18 |

**DAFTAR GAMBAR**

|  |  |
| --- | --- |
| Gambar 1. Green Finance Comprises ..................................... | 30 |
| Gambar 2. Green Investments ................................................. | 31 |
| Gambar 3-1. *Overview* Aliran Pendanaan Berbasis *Green* yang diusulkan .................................................. | 40 |
| Gambar 3-2. Proses Bisnis yang Memperhatikan Kelestarian Sumberdaya lingkungan ................................... | 43 |

**Halaman sengaja dikosongkan**

**B A B 1**

**PENDAHULUAN**



**1.1 Kegiatan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat**

Perhatian Dunia terhadap beragam masalah terkait dengan lingkungan hidup sudah dituangkan sejak 45 tahun yang lalu, dengan diselenggarakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup di **Stockholm** pada tahun 1972. Namun kenyatannya dunia masih menghadapi **2 (dua) permasalahan besar**, yaitu: **(i)** masalah pemenuhan kesejahteraan rakyat disatu sisi, serta **(ii)** masalah pelestarian fungsi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai penopang kehidupan manusia disisi lainnya. Kedua masalah tersebut pada kenyataannya memang selalu dipertentangkan satu dengan lainnya.

Dengan jumlah manusia yang terus mengalami peningkatan (± 7.5 milliar orang), akibatnya bumi yang kita pijak ini mengalami tekanan berat sebagai dampak dari kegiatan ekonomi yang diciptakan manusia dengan tidak memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Keserakahan ekonomi selain menghasilkan krisis ekonomi dan finansial, juga telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti: perubahan iklim, degradasi lingkungan, eksplorasi sumber daya alam secara masif, serta pencemaran air dan udara.

Kegiatan pembangunan ekonomi dan bisnis untuk memenuhi kesejahteraan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, nampaknya masih lebih banyak bertumpu kepada sumber daya alam, mengingat indonesia memiliki kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang sangat baik. Hal demikian menyebabkan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan sedikit terabaikan. Sebagai konsekuensinya maka akan memunculkan beragam masalah lingkungan hidup dikemudian hari, seperti pencemaran air, udara dan tanah. Kondisi demikian pada akhirnya mendorong timbulnya kantong-kantong kemiskinan baru pada masyarakat. Khususnya yang bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan, seperti daerah terdampak diwilayah eksplorasi tambang/*mining*; wilayah hutan produksi (meliputi 21% dari cakupan atau tutupan hutan) dengan kasus *illegal loging* dan perambah liar hutan lindung; kawasan industri dengan penurunan kualitas udara dan air dan bencana banjir serta tanah longsor. Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap sumberdaya yang dimiliki atas nama kesejahteraan masyarakat yang dilakukan baik oleh pemerintah (badan-badan usaha milik pemerintah) maupun oleh sektor swasta telah banyak menyisakan cerita pahit bagi kelompok masyarakat terdampak di daerah kawasan industri tersebut serta kerusakan sumber sumber-sumber alam, khususnya yang tak terbarukan.

**1.2 Permasalahan Ekonomi Sosial dan Lingkungan**

Meski produk domestik bruto (PDB) Dunia tahun 2016 mencapai nilai 69.65 triliun [dollar AS](http://indeks.kompas.com/tag/dollar.as), dimana lebih dari Sembilan ratus juta orang masih berada dan hidup di bawah garis kemiskinan, dimana seseorang dikatakan miskin apabila memiliki pendapatan dibawah US $ 2,00 per-hari. (*United Nation)*. Menurut *World watch Institute*, PDB itu telah menimbulkan ”**stres**” pada ekosistem Bumi. Inilah yang kemudian disebut oleh David Orr sebagai ***progress trap*** atau jebakan kemajuan, di mana tujuan untuk mensejahterakan manusia harus dibayar **mahal berupa ongkos sosial dan lingkungan**. Jebakan ini pada akhirnya akan menafikan hasil yang dicapai dari kemajuan tersebut sehingga beberapa ilmuwan bahkan mengusulkan upaya perlambatan pertumbuhan ekonomi (*de-growth*) dengan menekan konsumsi yang *eksesif* terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 254.9 juta orang pada tahun 2015 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 862 Milyard US Dollar dengan PDB per-kapita 3.39 US dollar juga masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk menaikan tingkat kesejahteraan penduduknya atau menurunkan tingkat kemiskinan warganya, dimana berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).

Dalam beberapa dekade, persoalan ekonomi dan lingkungan seolah berjalan sendiri-sendiri, bahkan tidak jarang perspektif lingkungan dianggap sebagai **portal** untuk menahan laju pembangunan ekonomi. Pola ”***growth first*, and *then* *clean up late****r*” merupakan pola pikir yang sering muncul bahkan menjadi modus pada perencanaan kebijakan pembangunan, khususnya di daerah-daerah demi mengejar pendapatan asli daerah (PAD). Urusan ”**cuci piring**” kerusakan Bumi, adalah urusan belakangan, oleh karena itu paradigma ini harus segera kita ubah. Berikut beberapa hal yang sangat penting terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya ekonomi dalam implementasi **bisnis** (tata kelola keuangan perusahaan: **investasi; pendanaan dan distribusi *earning*s**) yang dilakukan baik oleh sektor pemerintah maupun sektor swasta nasional dan asing, **fokus permasalahan terkait dengan ekonomi lingkungan,** diantarannya:

1. Sektor ekonomi dan lingkungan bukanlah 2 (dua) hal yang bersifat **diametrikal.** Yang diperlukan untuk menjembatani keduanya adalah mencari ”*the right kind of growth*”, yakni selain memenuhi pertumbuhan ekonomi, juga mampu memelihara lingkungan bahkan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dari sumber daya alam dan lingkungan tanpa merusaknya (pembangunan ekonomi dan bisnis yang ramah dan peduli lingkungan).
2. Permasalahan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung mayoritas diakibatkan aktivitas manusia, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, ekonomi dan bisnis, telah menjadi *i****ssue***sentral di semua kalangan. Kepedulian dan kesadaran akan lingkungan, telah merubah cara pandang dan pola hidup dari manusia dan para pelaku usaha. Fenomena ini mendorong munculnya konsep *Green Business* yang merupakan paradigma baru dalam dunia bisnis yang lebih mengutamakan keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial dan lingkungan alam. Isu *go green* yang terus digulirkan sejumlah aktivis/pegiat lingkungan ternyata ikut berpengaruh terhadap perkembangan bisnis (investasi dan pendanaan) baik skala nasional regional maupun internasional.
3. Dalam kenyataanya, banyak perusahaan yang tidak mempraktikkan atau **abai** terhadap praktik bisnis hijau, seringkali tidak dapat bertahan dalam jangka panjang, karena masalah kepercayaan *public* atau *market* bahwa perusahaan telah **serakah dalam mengekploitasi sumber sumber daya alam**, sehingga dalam jangka panjang ***return*** yang terealisasikan jumlahnya makin kecil sementara ongkos yang harus dibayar relatif menunjukkan trend yang semakin meningkat.

Dengan demikian, nampak bahwa tata kelola keuangan (terkait *issue* investasi; pencarian sumber pendanaan dan ditribusi ***earning****s* perusahaan) yang tidak memperhatikan sektor lingkungan alam sekitarnya (praktik-***red-business***) menjadi salah satu permasalahan penting agar perusahaan dapat tetap memperoleh keuntungan jangka panjang, sehingga muncul urgenitas menata pendanaan, investasi dan ditribusisi *earnings* perusahaan tersebut dengan memperhatikan keamanan serta keberlanjutan kelestarian lingkungan alam, sosial kemasyarakatan dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

**B A B II**

**LITERATUR REVIEW**



**2.1 Model Ekonomi Hijau (*Green* *Economy Model*)**

Menurut pendapat Afiff (2012) Indonesia adalah negara ke-dua paling kaya di dunia untuk keanekaragaman hayati darat (***terrestrial biodiversity***) setelah Negara Brasil dan peringkat pertama untuk keanekargaman hayati atau biota laut (***marine biodiversity*)**. Walaupun hanya meliputi 1,3% dari seluruh permukaan daratan bumi, hutan Indonesia mencapai 10% hutan dunia dan merupakan rumah bagi 20% spesies flora dan fauna dunia, 17% spesies burung dunia dan lebih dari 25% spesies ikan dunia. Dalam hampir setiap sepuluh hektar hutan pulau Kalimantan misalnya, memiliki berbagai spesies pohon yang berbeda-beda melebihi yang ditemukan di seluruh Amerika Utara, apalagi jika didalamnya dimasukkan jumlah tumbuhan, serangga, dan hewan langka yang tidak dapat ditemui di tempat lain dimanapun di seantero dunia. Meskipun pulau Kalimantan luasnya hanya 1% dari luas permukaan bumi, namun menurut laporan ***United State Agency for International Development***(*USAID*) memiliki 6% spesies burung dunia, spesies mamalia dunia, dan spesies tumbuhan berbunga di dunia. Seluruh kepulauan Karibia hanya memiliki sekitar satu per sepuluh ke-anekaragaman hayati laut Indonesia yang terletak di pertemuan samudera Hindia, laut Cina selatan, dan samudera Pasifik yang memperoleh makanan dari ketiga kawasan laut tersebut.

**Namun demikian, riset yang dilakukan oleh Alfred Nakatsuma dalam Afiff (2012) menemukan bahwa:**

**(i)** **Indonesia kini kehilangan hutan tropika** seluas negara bagian Maryland setiap tahunnya, dan karbon (CO) yang dilepaskan oleh penebangan dan pembukaan hutan sebagian dilakukan secara liar/illegal,

**(ii)** **Telah menjadikan Indonesia negara ketiga paling besar di dunia untuk emisi gas rumah kaca**, setelah Amerika Serikat dan Cina dan peringkat ke-empatnya adalah Brasil,

(**iii)** **Lebih dari 70% emisi CO2 di Indonesia berasal dari penebangan dan pembukaan hutan.**

Sementara itu menurut *Conservation International*, setiap jamnya hutan Indonesia ditebang 300 kali seluas lapangan sepak bola. Penebangan liar di hutan nasional menyebabkan pemerintah Indonesia kehilangan US $ 3 (tiga) milyar pendapatan negara setiap tahunnya, bahkan pembukaan hutan secara resmi pun dilakukan secara besar-besaran karena Indonesia masih berusaha menumbuhkan ekonominya dengan **menjual produk-produk hasil hutan**. Begitu pula yang terjadi di wilayah lautan, perairan di sekitar 17 ribu pulau di kepulauan Indonesia memiliki 14% terumbu karang bumi dan lebih dari 2 ribu spesies ikan yang hidup di terumbu karang. Terumbu karang adalah tempat bernaung, struktur, sekaligus substrat, sebagaimana pohon di hutan yang apabila hilang maka berbagai jenis spesies binatang punah, begitu juga apabila tidak ada terumbu karang ikan pun punah.

Melihat perkembangan dan fenomena eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber ekonomi secara eksesif, maka dibutuhkan suatu pendekatan ekonomi yang tidak hanya bersifat ***business as-usual*,** namun cenderung pada konsep ***green-economy***untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan risiko kerusakan ekologi. Pendekatan ekonomi yang berkeadilan pada dasarnya sama pentingnya dengan memperkecil risiko lingkungan dan pengikisan aset ekologi. Komitmen untuk menerapkan ***reducing emission from deforestation and degradation***(REDD) merupakan tantangan bagi pemerintah dan pelaku bisnis Indonesia guna menerapkan konsep ekonomi hijau (***green economy***) secara utuh. Karena dengan **ekonomi hijau akan terjawab aspek pelestarian** **lingkungan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus secara bersamaan**.

Melalui pendekatan kebijakan ekonomi hijau diharapkan mampu menggantikan kebijakan lingkungan yang pada masa lampau kerap difokuskan pada solusi jangka pendek semata. Dengan pendekatan baru ini, kebijakan ekonomi hijau diharapkan mampu memadukan aspek "pelestarian lingkungan" dan "pertumbuhan ekonomi". Dengan perkataan lain, implementasi model pendekatan *Green Economy* melalui tata kelola keuangan perusahaan (investasi; pendanaan dan dividend hijau) akan mampu menjawab saling ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi terhadap perubahan iklim dan pamanasan global.

Beberapa pendapat ahli dan hasil kajian empiris seperti yang dilakukan oleh Earnhart dan Lizal (2006), Sarah dan Peter (2000), Molina Azorın et.al. (2009) Purnomo et.al. (2012), Mutaminah dan Siyatimah (2012), serta Djoko Wintoro (2012), menunjukkan bahwa perusahaan yang mengimplementasikan *green-business* (memiliki kepedulian dan kinerja lingkungan yang lebih baik) terbukti secara empirik dapat meningkatkan nilai perusahaan. Mereka berpendapat bahwa terkait dengan sinkronisasi antara tujuan ekonomi perusahaan dan tujuan lingkungan, untuk meningkatkan nilai perusahaan (tujuan-ekonomi) dimanifestasikan dalam keputusan investasi yang memberikan profit baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan untuk terpeliharanya lingkungan dalam jangka panjang model *green business* dapat mensinergikan tujuan ekonomi dan tujuan lingkungan perusahaan.

**United Nations Environment Programme** atau UNEP (2011) menyatakan bahwa pengertian *green economy* lebih luas cakupannya dibandingkan *Low-Carbon Economy* (LCE) atau *Low-Fossil-Fuel Economy* (LFFE), yaitu aktivitas ekonomi yang memberikan *output* minimal terhadap emisi *Green Houses Gas* (GHG) yang dilepaskan. Model ekonomi baru tersebut didasarkan pada ilmu ***ecological economics***yang membahas ketergantungan manusia dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Indikator penerapan ***green economy***dalam suatu perekonomian dapat dilihat melalui beberapa aktivitas, seperti peningkatan **investasi publik dan *private***dalam sektor *hijau*: **(i)** peningkatan dalam kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan di sektor *hijau*, **(ii)** peningkatan GDP dari sektor *hijau*, **(iii)** penurunan penggunaan energi/sumber daya per unit produksi, **(iv)** penurunan level CO2 dan polusi serta (**v)** penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah. **Sektor hijau** yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sektor-sektor yang mampu memproduksi produk-produk ramah lingkungan.

Menurut Fauzi (2010a); dan Fauzi et.al. (2013) dalam Yusniar J.Nababan et.al (2014) menyatakan bahwa dalam konteks **ke-Indonesi-an,** konsep ***green economy***idealnya mengandung karakteristik khusus yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak terbatas pada penekanan penggunaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Kebijakan ekonomi hijau Indonesia menekankan pada pengurangan kemiskinan dan internalisasi biaya lingkungan hidup. Delegasi Indonesia dalam pertemuan *Global Ministerial Forum* (GMF)di Bali tahun 2010 menyatakan bahwa definisi ekonomi hijau, menurut Indonesia adalah

*“A development paradigm that based on resource efficiency approach with strong emphasizes on internalizing cost of natural resource depletion on environmental degradation, efforts on alleviate the poverty, creating decent jobs and ensuring sustainable economic growth”*.

Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia, penerapan ekonomi hijau berarti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan dan dapat menciptakan sumber pertumbuhan baru melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan.

**2.2 Model Bisnis Hijau (*Green Business Model*)**

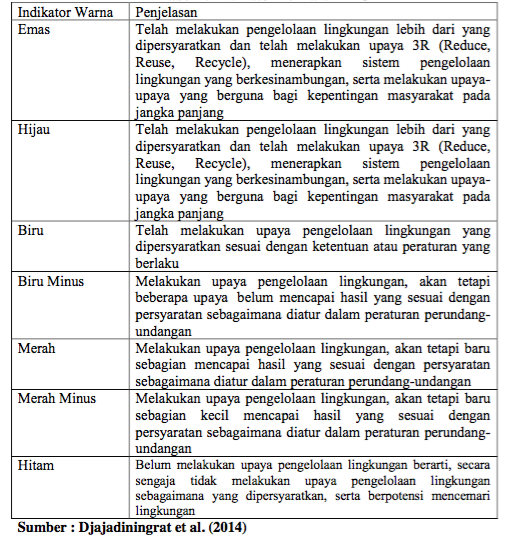
Pada dasarnya kegiatan bisnis perusahaan merupakan kegiatan atau interaksi yang dilakukan antara manusia dengan lingkungannya, oleh karena itu sudah selayaknya aktivitas bisnis yang mereka lakukan memperhatikan tempat atau lingkungan dimana kegiatan bisnis tersebut dilaksanakan. Manakala menyoal permasalahan lingkungan bisnis, permasalahan tersebut bukanlah milik bangsa Indonesia saja, akan tetapi juga merupakan permasalahan masyarakat ekonomi global. Lingkungan merupakan jantungnya dunia, sehingga begitu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kemajuan kegiatan di bidang industri dan ekonomi berdampak pada banyaknya material berbahaya yang di timbulkan oleh para pelaku industri, diantaranya: pencemaran udara, banjir, kerusakan hutan, perubahan iklim yang ekstrim (***extreme climate change***) dan pemanasan global (***global warming***).

Perusahaan bukanlah entitas yang hanya menjalankan kegiatan usahanya untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan kemanfaatan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholde*r). Menurut Sartono (2012) yang dimaksud *stakeholder* itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan; pihak-pihak tersebut meliputi; (i) karyawan dan manajemen, (ii) kreditur, (iii) *supplier*, (iv) masyarakat sekitar (lingkungan), (v) perusahaan, (vi) pemerintah dan (vi) pemegang saham. Pihak yang juga harus diperhatikan oleh perusahaan adalah menyangkut lingkungan disekitar perusahaan.

Menjadi sangat menarik perhatian dalam komunitas bisnis dan menjadi kajian empirik terkait adanya hubungan yang erat antara pengelolaan lingkungan dan nilai perusahaan. Dalam perspektif ekonomi konservatif menganggap bahwa pengeluaran biaya-biaya pengelolaan lingkungan, seperti: pengolahan limbah dan strategi pencegahan polusi, dianggap sebagai sesuatu yang akan menguras sumber daya perusahaan dan menggunakan dana menjadi tidak produktif. Namun pergerakan dinamika entitas usaha yang berkembang pesat menyatakan bahwa pencegahan polusi dan evaluasi ulang proses produksi dari suatu perusahaan menciptakan kesempatan bagi perusahaan untuk mengubah strategi produksi (misalnya, menggunakan kembali/daur ulang bahan baku, bahan pengganti yang kurang berbahaya bagi lingkungan, dan lain lain) dan membuat inovasi keunggulan kompetitif. Hal ini lebih lanjut dinyatakan bahwa perusahaan dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik bagi para investor adalah investasi yang lebih menarik karena lebih rendah biaya dan patuh dalam melaksanakan kewajiban lingkungan (Filbeck dan Gorman 2004).

Mengingat akan pentingnya bisnis yang berorientasi terhadap kelestarian lingkungan (***green business***)tersebut, pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup meluncurkan Pogram Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (**PROPER**) yang merupakan pengembangan dari **Proper Prokasih**. Tujuan penerapan instrument PROPER adalah untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan guna mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup. **Peningkatan kinerja penaatan dapat terjadi melalui efek insentif** dan **disinsentif** serta **reputasi** yang timbul akibat pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik. Kinerja lingkungan inilah yang menjadi indikator bahwa perusahaan telah menerapkan g*reen business* (Handoko 2012).

**Tabel 1.**

**Indikator Penilaian PROPER di Indonesia**

*sumber: Djajadiningrat et.al (2014)*

Di Indonesia penilaian kinerja lingkungan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan undang-undang yang berlaku. Indikator penilaian kinerja lingkungan dengan menggunakan warna dari peringkat tertinggi warna emas hingga terendah warna hitam. Berikut penjelasan kriteria indikator warna penilaian PROPER bagi perusahaan.

Fenomena bisnis hijau mendorong perusahaan-perusahaan yang ***listing*** di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk beroperasional menjadi *green*, dimana sejak 8 Juni 2009, Yayasan KEHATI bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks SRI KEHATI yang mengacu pada tata cara *Sustainable and Responsible Investment* (SRI) dengan nama Indeks SRI KEHATI. Dengan peluncuran indeks SRI KEHATI ini diharapkan masyarakat mengenal adanya indeks yang menggambarkan perusahaan-perusahaan yang menguntungkan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dengan membentuk indeks SRI KEHATI ini bertujuan untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat luas mengenai ciri dari perusahaan terpilih pada indeks SRI KEHATI yang dianggap memiliki bermacam bentuk pertimbangan dalam usahanya berkaitan dengan;

(i) kepedulian pada lingkungan,

(ii) tata kelola perusahaan,

(iii) keterlibatan masyarakat,

(iv) sumber daya manusia,

(v) hak asasi manusia, dan perilaku bisnis dengan etika bisnis yang diterima di tingkat international.

**2.3 *Stakeholders* atau *Stockholders***

Menurut konsep tata kelola keuangan perusahaan modern dengan dasar teori keagenan (*agency theory*) menyebutkan bahwa tujuan perusahaan didirikan adalah untuk mensejahterakan secara finansial para pemilik atau para pemegang saham (*stockholders*). Para pengelola atau para eksekutif adalah orang atau kelompok orang yang diberi wewenang oleh para pemilik yang kemudian disebut agen, sementara para pemilik adalah *principals*. oleh karena itu, para agen adalah kelompok profesional yang harus bekerja atas keinginan dari para pemilik atau *principals*.

Selanjutnya berdasarkan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen-Meckling (1976) mengatakan bahwa para agen ini dibayar sesuai dengan profesionalismenya untuk bekerja dan memuaskan keinginan dari para pemiliknya. Bagi perusahaan yang sahamnya telah beredar di pasar/bursa saham (*outstanding share*), maka tujuan perusahaan ini didefinisikan sebagai usaha untuk memaksimisasi nilai/harga pasar saham. Ketika persepsi pasar/investor positip terhadap perusahaan emiten, maka akan diikuti naiknya harga pasar saham (*market stock price*), naiknya harga saham pada akhirnya akan menaikan kekayaan perusahaan, jika dibandingkan dengan nilai bukunya (*book value*). Sehingga menurut teori ini, manajemen atau perusahaan dianggap sukses atau berhasil apabila pasar bereaksi positip dan harga saham menunjukkan peningkatan secara signifikan. (Jensen, M. C. (2001)).

Menurut Sartono (2012), menyatakan bahwa akhir-akhir ini ada pandangan bahwa tujuan normatif bagi perusahaan yang ingin dicapai **tidak hanya** memaksimumkan kekayaan para pemilik atau pemegang saham (*shareholder*), **tetapi juga** memaksimumkan kemakmuran para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pihak yang juga harus diperhatikan oleh perusahaan adalah menyangkut masyarakat disekitar perusahaan. Saat ini masyarakat semakin *highly demanding*, kritis, dan seiring dengan berkembangnya kesadaran tentang keselamatan lingkungan maka perusahaan tidak dapat lagi mengabaikan hak-hak masyarakat disekitarnya.

Teori *stakeholder* mengacu pada 4 (empat) kelompok ilmu-ilmu sosial:sosiologi, ekonomi, politik dan etika, terutama literatur tentang perencanaan perusahaan, teori sistem, tanggung jawab sosial perusahaan dan studi organisasi. Istilah *stakeholder* telah dipakai oleh banyak pihak dalam berbagai ilmu dan konteks misalnya manajemen bisnis, pengelolaan sumberdaya alam, ilmu komunikasi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah *stakeholder* ini kedalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan.

Perkembangan teori *stakeholders* membawa perubahan terhadap indikator kesusuksesan perusahaan. Hal tersebut tercermin dengan munculnya paradigma baru dalam dunia bisnis yang mensinergikan antara ukuran-ukuran ke-ekonomi-an, aspek sosial kemasyarakatan dan masalah lingkungan. Konsep tersebut kemudian dikenal dengan istilah **2.4** ***Triple Bottom Line***(TBL).

TBL adalah sebuah Konsep pengukuran kinerja perusahaan secara “*holistik*” dengan memasukkan 3 ukuran kinerja secara simultan, 3P (**Profit-Planet-People),** yaitu: (i) *economic,* (ii) *environmental,* (iii) *social* (EES). Selanjutnya variabel *Economic*, dikaitkan dengan usaha bisnis dalam meraih keuntungan usaha atau *profit,* sementara variabel lingkungan atau *environment* diorientasikan pada sikap eksekutif perusahaan dalam menyikapi mengenai kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, dan variabel *social* diasosiasikan manajemen terhadap kepedulian sosial kemasyarakatan (Elkington 1997). Menurut Gago dan Antolin (2004) dalam Djoko Wintoro (2012), mengemukakan bahwa lingkungan menjadi elemen penting bagi aksi sosial perusahaan sehingga menjadi perhatian besar bagi perusahaan untuk menjadikan komponen lingkungan ini sebagai bagian *stakeholder* yang berdampak pada kinerja perusahaan.

**2.5 Maksimisasi Nilai Perusahaan (*Maximization Value of the firm*)**

Menurut pendapat Keown (2008) yang mengatakan bahwa perusahaan haruslah bertujuan memaksimalkan nilai atau kekayaan para pemegang saham (*shareholders welfare*) dengan cara memaksimalkan harga saham perusahaan. Tujuan ini tidak hanya merupakan kepentingan bagi para pemegang saham semata, tetapi juga akan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Ini akan terjadi ketika sumberdaya-sumberdaya yang langka diarahkan ke pemanfaatan yang paling produktif dalam menciptakan kekayaan (*earnings-assets*). Memaksimalkan nilai perusahaan adalah melalui strategi pengambilan keputusan investasi dan pendanaan yang efektif dan efisien. **Efektif dalam keputusan investasi** akan tercermin dalam pencapaian tingkat keuntungan yang optimal. **Efisien dalam pendanaan** akan tercermin dalam perolehan dana dengan biaya minimum. Keputusan strategis tersebut akan menyumbang pencapaian tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan (*shareholders financial welfares*).

Menurut riset yang dilakukan oleh Dockery et.al. (2000) menyatakan bahwa untuk menciptakan nilai perusahaan dapat dilakukan melalui strategi yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang dengan meningkatkan *margin* operasi, menghasilkan produk baru, menggunakan *leveraged* untuk membiayai operasi secara efisien, investasi dan strategi optimalisasi modal yang baik. Dalam jangka panjang tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan semakin sejahtera juga para pemiliknya. Nilai perusahaan akan tercermin dalam harga sahamnya (Fama 1978).

Beberapa pendapat ahli dan hasil kajian empiris seperti yang dilakukan oleh Earnhart dan Lizal (2006), Sarah dan Peter (2000), Molina Azorın et.al. (2009) Purnomo et.al. (2012), Mutaminah dan Siyatimah (2012), serta Djoko Wintoro (2012), menunjukkan bahwa perusahaan yang mengimplementasikan *green-business* (memiliki kepedulian dan kinerja lingkungan yang lebih baik) terbukti secara empirik dapat meningkatkan nilai perusahaan. Mereka berpendapat bahwa terkait dengan sinkronisasi antara tujuan ekonomi perusahaan dan tujuan lingkungan, untuk meningkatkan nilai perusahaan (tujuan ekonomi) dimanifestasikan dalam keputusan investasi yang memberikan profit baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan untuk terpeliharanya lingkungan dalam jangka panjang model *green business* dapat mensinergikan tujuan ekonomi dan tujuan lingkungan perusahaan.

**2.6 Sinkronisasi Tujuan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (*Synchronization of The objective of Economic, Social and Environment*)**

Mengutip pendapat Indriani dan Wahyudi (2013), mereka menyatakan bahwa dalam jangka panjang, tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan tidak inheren dan bertentangan satu sama lain. Namun demikian, ketiga aspek tersebut terhubung secara terpadu satu dengan lainnya. Pencapaian tujuan ini dijelaskan melalui hubungan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan yang merupakan gabungan dari manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi.

Apabila ekonomi diterapkan pada isu-isu lingkungan, maka dapat diperoleh kesadaran yang lebih mendalam untuk meningkatkan lingkungan dengan tujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai hal yang telah ditetapkan. Asumsi dengan tujuan sosial digunakan untuk menghitung peningkatan atau penurunan merupakan hal yang penting. Untuk jelasnya, peningkatan kualitas lingkungan juga merupakan peningkatan ekonomi apabila menigkatkan kepuasaan atau kesejahteraan sosial (Djajadiningrat et.al.:2014). Sementara itu, Aras dan Crowther (2013) menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran dan perkembangan persepsi tentang aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan yang telah diterima secara umum baik manajemen perusahaan, pemerintah dan masyarakat umum, sehingga perusahaan menetapkan kebijakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan harus menjadi bagian aktivitas perusahaan. Jika dikaitkan dengan tujuan perusahaan, maka sinkronisasi tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan tantangan bagi perusahaan saat didorong untuk berpikir tentang keberlanjutan dalam orientasi tujuan perusahaan.

Elkington (1997) berpendapat bahwa keberlanjutan adalah keseimbangan antara orang/people, planet, dan keuntungan/profit, yang dikenal sebagai konsep *Triple Bottom Line* (TBL). Kerangka pikiran dan konsep keberlanjutan yang terletak di antar muka antara tiga aspek, orang-orang-sosial, dan planet-lingkungan, serta profit ekonomi. Oleh karena itu, Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak positif dan negatif yang terjadi pada ekonomi, dan sosial lingkungan. Keberlanjutan adalah tujuan akhir yang hendak dicapai oleh semua perusahaan/organisasi dalam rangka menyeimbangkan antara kinerja ekonomi, kesejahteraan sosial, dan peremajaan dan pelestarian lingkungan hidup.

**2.7 Manajemen Keuangan Berbasis Green (*Green Financial management*)**

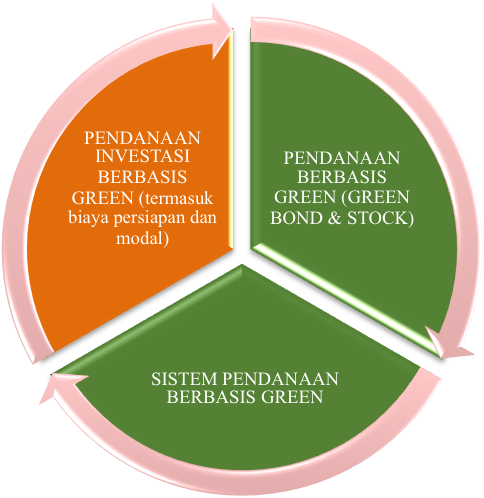
Tujuan manajemen keuangan perusahaan secara konservatif hanya memfokuskan pada peningkatan kemakmuan para pemegang saham (*shareholders*) dan mengabaikan kemakmuran sosial dan keberlanjutan sumberdaya alam tidak terbarukan. Misalnya, **polusi** merupakan eksternalitas yang seringkali menjadi beban sosial dan diabaikan sebagai biaya internal perusahaan. Biaya kerusakan sumberdaya alam juga tidak dimasukkan dalam biaya produksi perusahaan. Dengan mengabaikan beban sosial dan kerusakan yang ditimbulkan dari eksploitasi sumberdaya alam, maka terjadi kelebihan perhitungan atas kemakmuran para pemegang saham.

Porter and Kramer (2011) dalam Wintoro (2014) mengajukan konsep berbagi nilai kemakmuran (*shared wealth value*) yaitu kemakmuran antara para pemegang saham dengan kemakmuran sosial dan keberlanjutan sumberdaya alam tidak terbarukan. Nilai kemakmuran positif apabila manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang tertanggung. Beban sosial sudah selayaknya menjadi biaya internal perusahaan dan biaya kerusakan sumberdaya alam juga menjadi tanggung jawab perusahaan dan diperlakukan sebagai biaya pemulihan sumberdaya alam.

Pemikiran berbagi nilai kemakmuran berakar dari perlunya perbaikan kelemahan pemikiran sempit kapitalisme. Bisnis berkontribusi pada kemakmuran sosial melalui perolehan laba bisnis sehingga perusahaan dapat membuka lapangan kerja, membayar upah berkelanjutan, melakukan investasi dan tentunya membayar kewajiban pajak. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pandangan sempit kapitalisme memberi dampak negatif terhadap aspek sosial karena keuntungan bisnis yang diperoleh menyisikan beban sosial dan kerusakan sumberdaya alam.

Secara bersama-sama kegiatan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, juga meningkatkan kemakmuran sosial dan menjaga keberlanjutan dapat diintegrasikan agar mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara berkelanjutan Merujuk pada *signaling theory,* dimana perusahaan harus mampu menyampaikan signal/tanda-tanda kepada para pelaku pasar modal dan komunitas sosial tentang implementasi keuangan bisnis hijau. Positif *signal* kepada pasar atau investor akan memberikan respon positif berupa meningkatnya reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan karena peduli terhadap lingkungan akan menaikkan nilai prestasi dan pada akhirnya prestasi perusahaan ini akan mendorong persepsi baik sekaligus *good news* bagi investor, sehingga pada kahirnya akan mampu mengugkit kenaikan harga saham dan kepada para pelanggan diharapkan bersedia membayar harga premium terhadap produk dan layanan hijau. Dengan demikian efektifitas implementasi *signaling theory* akan manfaat besar bagi perusahaan yang menjalankan keuangan bisnis hijau dibandingkan dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan.

Manajemen Keuangan Hijau (***green financial management***) adalah salah satu konsep manajemen keuangan dengan memasukkan pertimbangan secara keseluruhan mengenai; keterbatasan sumber daya, manfaat sosial dan perlindungan atau kelestarian lingkungan alam dan profitabilitas perusahaan dalam formulasi tujuannnya. **Dasar Manajemen Keuangan Hijau** adalah munculnya Ide-ide atau inisiatif untuk memecahkan masalah lingkungan ekologi antara perusahaan dan masyarakat, konsep manajemen keuangan yang memasukkan manfaat komunikasi sosial kemasyarakatan dan masalah lingkungan ekologi dari sudut pandang perolehan dan peng-alokasian modal *source of fund and allocation of fund based green*. Peraga\_1 berikut ini akan menggambarkan mengenai *green finance* yang dimodifikasi dari *German Development Institute* (GDI) pada tahun 2014.



*Sumber: Dimodifikasi German Development Institute (2014)*

**Gambar 1: Green Finance Comprises**

Dalam Gambar\_1 tampak bahwa menurut *Green Development Institute*, ada 3 (tiga) unsur penting konsep *green finance,* yaitu: (i) bagaimana manajemen mampu membiayai beragam peluang nvestasi berbasis *green* (*Investment Opportunities Set based green*) termasuk didalamnya biaya modal dan persiapan *project investment*, (ii) komponen kedua adalah bagaimana perusahaan membiayai investasi berbasis g*reen* tersebut melalui beragam skim penerbitan saham dan obligasi hijau (***green common stock and green bond/debt****)* melalui apa yang disebut ***public green policies***, dan (iii) ketiga adalah bagaimana fihak manajemen mampu membangun sistem pendanaan hijau *(green financial system)*.



*Sumber: DimodifikasI Dari German Development Institute (2014)*

**Gambar\_2: Green Investments**

Pada Peraga atau Gambar\_2, tampak sejumlah opsi bidang investasi hijau yang dapat dimanfaatkan. Perluasan investasi hijau (*green-investment expansion*) sangat diperlukan untuk mencapai target realisasi ekonomi ramah lingkungan, tetapi ada berbagai masalah baru yang harus segera diselesaikan. Misalnya, masalah skala investasi tambahan yang signifikan sangat dibutuhkan di masa depan, karena dalam prakteknya jumlah realisasi investasi masih terbatas bagi para investor yang tertarik untuk melakukan investasi hijau sehingga sering terkendala masalah skala ekonomi, begitu pula penyediaan pendanaan yang ramah terhadap lingkungan hidup belum mencapai tingkat yang diharakan. Misalnya penerbitan ***green bond***atau penerbitan ***green stock*** atau ***green debt or bank debt***.

Investasi pada bidang bidang eksplorasi sumber daya alam yang bersifat terbarukan seperti pemanfaatan potensi angin untuk pembangkit listrik, tenaga surya (*solar cell*) begitu juga tenaga panas bumi dalam implementasinya masih menghadapi banyak kendala teknis, seperti perubahan cuaca yang ekstrim dan juga pola perilaku manusia. Selain itu, kurangnya catatan yang lengkap mengenai kinerja dalam pemanfaatan energi terbarukan atau bidang lingkungan lainnya menambah kesulitan evaluasi dan membuat keputusan untuk berinvestasi berbasis *green* ini.

Peningkatan investasi hijau yang dibutuhkan untuk memecahkan beragam permasalahan seperti terbatasnya jumlah investor, ketidakseimbangan antara risiko dan *return*, dan kurangnya informasi dan evaluasi keahlian yang diperlukan untuk membuat keputusan untuk berinvestasi.

**B A B III**

**MODEL MANAJEMEN**

**KEUANGAN HIJAU**



***GREEN BUSINESS***merupakan salah satu bagian dari *green economy* yang men-sinergikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui implementasi *green business* akan diperoleh suatu sinergi dan kesinambungan antara a). Tujuan ekonomi, yaitu: keberlangsungan profit dan pertumbuhan perusahaan, b). Tujuan sosial, yaitu: kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, c). Tujuan lingkungan, yaitu: terpeliharanya lingkungan dalam jangka panjang (Handoko 2012). *Green economy* juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis, dan yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Hal ini terkait erat dengan **ekonomi ekologi**, namun memiliki fokus yang lebih politis untuk diterapkan.

Menurut pendapat Nur Utomo (2014) mengatakan bahwa terdapat sejumlah cara yang berbeda-beda untuk mengukur kinerja lingkungan sebagai indikator *green business* yang digunakan dalam berbagai literatur. Gupta dan Goldar (2003) dalam Sarumpaet (2005), menyampaikan pengukuan kinerja lingkungan dalam implementasi *green business* menggunakan Peringkat lingkungan yang disediakan oleh NGO atau LSM lingkungan hidup terkemuka. Di sisi lain, Schaltegger dan Terje (2001) dalam Sarumpaet (2005) menyarankan bahwa penelitian dan praktik bisnis hijau harus lebih fokus pada **eko-efisiensi** sebagai ukuran kinerja lingkungan. **Eco- efficiency** adalah rasio nilai tambah dan dampak lingkungan.

Beberapa perusahaan DI Indonesia sudah mulai berupaya mencoba mentransformasikan dari pola pengelolaan bisnis secara konvensional ke *green business*. Secara simultan perusahaan-perusahaan tersebut juga berupaya untuk mengimpelementasikan manajemen bisnis hijau. Buktinya sejumlah data empiris menunjukkan bahwa tujuan manajemen keuangan bisnis hijau telah memperluas jangkauan kemakmuran yang tidak hanya bagi para pemilik perusahaan saja (*owners*), namun juga telah meliputi kemakmuran sosial dan kemakmuran lingkungan sumberdaya alam. Ketiga jenis kemakmuran yang ingin dicapai menjadi satu kesatuan yang menjadi ciri dari tujuan pengelolaan keuangan hijau (*green financial management*).

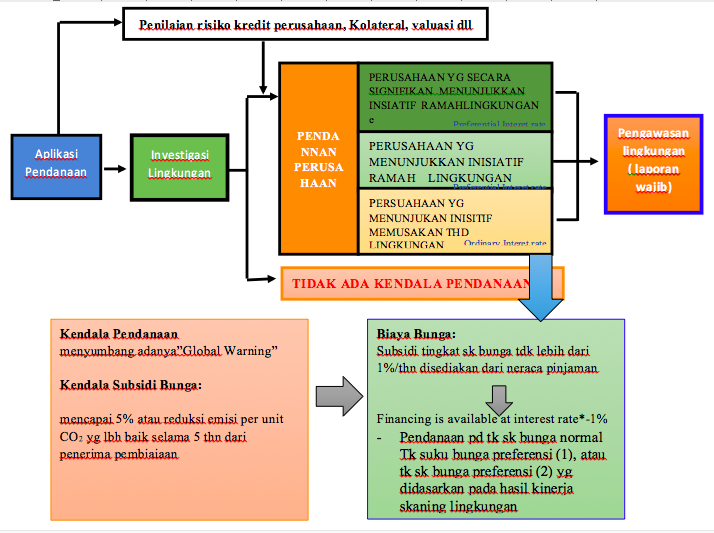
Menurut Djoko Wintoro (2012) perubahan penting dari orientasi **manajemen keuangan bisnis** hijau adalah memasukkan kemakmuran sosial dan keberlanjutan sumberdaya alam sebagai kriteria penciptaan nilai (***value-creation***) dalam pengambilan keputusan pendanaan, keputusan investasi dan juga keputusan mengenai distribusi *earnings* atau dividen berbasis *green.* Pada sisi lain, penanganan atau tata kelola risiko perusahaan juga memasukkan manajemen risiko kemakmuran sosial dan risiko keberlanjutan sumberdaya alam. Demikian juga kinerja perusahaan perlu diperluas cakupannya tidak hanya kinerja secara finansial tetapi juga mencakup kinerja kemakmuran sosial dan kinerja keberlanjutan sumberdaya alam.

Dalam penciptaan nilai perusahaan (***firm’s value creation***), pada mulanya konsep keuangan konservatif hanya berfokus pada 1 (satu) tujuan, yaitu maksimisasi nilai untuk peningkatan kemakmuran para pemegang saham, tapi dalam **keuangan bisnis hijau**, penciptaan nilai untuk memenuhi beragam tujuan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Artinya dalam manajemen keuangan bisnis hijau, teori pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholders theory*) menuntut direktur atau c*hief financial officer* (CFO) untuk membuat keputusan bisnis hijau dengan memperhatikan seluruh kepentingan para *stakeholders* perusahaan, terutama para pemegang saham, kelompok sosial dan lingkungan sumberdaya alam.

Tantangan utama bagi CFO perusahaan bisnis hijau adalah menjadikan tujuan para pemangku kepentingan perusahaan **menjadi sejalan** dalam satu tujuan besar keuangan perusahaan dan menghindari perbedaan tujuan sebagai sumber konflik kepentingan. Hubungan yang baik antara CFO dengan berbagai kepentingan akan memperkuat dan menjamin kinerja keuangan perusahaan. CFO perlu menyadari bahwa keuantungan perusahaan yang diperoleh dan dipergunakan sebagai sumber peningkatan kemakmuran para pemegang saham harus memperhitungkan biaya biaya sosial dan beban kerusakan lingkungan oleh karenanya dalam manajemen keuangan bisnis hajau keuntungan perusahaan harus sudah memperhitungkan kedalam biaya internal perusahaan atas biaya sosial dan biaya untuk memelihara kelestarias dari ekstraksi sumberdaya alam.

Padangan keliru, yang menyatakan bahwa manajemen keuangan bisnis hijau akan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Manajemen keuangan bisnis hijau membuka lebar-lebar atas inovasi dan kreasi teknologi untuk memperoleh biaya operasi dan menghasikan produk inovaif untuk mendongkrak pertumbuhan penjualan. keberlanjutan pertumbuhan penjualan, selanjutnya akan memberikan indikasi keunggulan bersaing perusahaan sehingga akan memicu penurunan biaya per-unit produk secara signifikan, pada akhirnya akan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Implikasi besar peningkatan pertumbuhan penjualan akan menjadikannya determinan penting pada pencipataan kemakmuran para pemegang saham.

Kemakmuran sosial dapat dicapai tanpa menimbulkan konflik dengan upaya maksimisasi perolehan keuntungan perusahaan. Dengan semakin mahalnya harga energi, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk hemat energi menjadi sangat penting untuk mampu meningkatkan kemakmuran sosial. Produk hemat energi misalnya, bermanfaat untuk menurunkan biaya konsumsi energi. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk rendah CO2 juga sangat membantu meningkatkan produktivitas kerja sosial, sehingga perusahaan lebih mampu meningkatkan kemakmuran sosial. perusahaan juga harus meningkatkan kapabilitasnya untuk berbisnis lebih bertanggungjawab dalam menurangi negatif eksternalitas sosial.



*Sumber: dikutip dari berbagai sumber dan diolah*

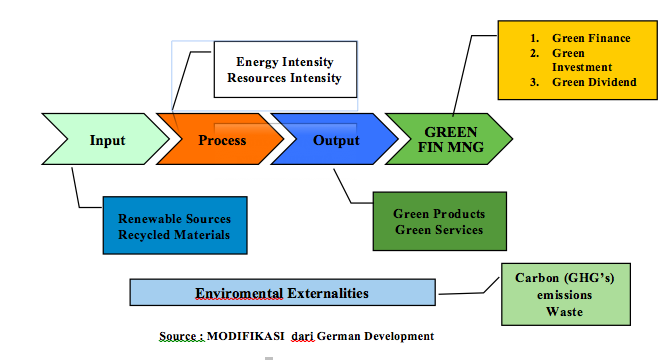
**Gambar 3-1: *Overview* Aliran Pendanaan Berbasis *Green***

**yang diusulkan**

Pada peraga 3 tersebut dijelaskan bagaimana aliran usulan pendanaan bagi projek investasi berbasis *green,* aplikasi disediaan khusus bagi perusahaan yang peduli lingkungan dengan melihat hasil *scaning* lingkungan serta data-data/*track record* perusahaan, secara bersamaan manajemen bank/lembaga keuangan lainnya menilai risiko kredit dan jaminan, apabila tidak ada kendala dengan eksplorasi masalah lingkungan, dengan data yang disediakan dari PROPER dan indeks SRI-KEHATI maka Lembaga Keuangan dan atau bank akan memberikan subsidi tingkat suku bunga pada perusahaan perusahaan yang sangat memperhatikan aspek kelestarian alam.

Kegiatan menjaga kemakmuran sosial menambaah biaya internal perusahaan pada satu sisi, namun pada sisi lainnya kemakmuran sosial menciptakan manfaat besar bagi perusahaan berupa keberlanjutan tersedianya tenaga kerja produktif, sehingga secara keseluruhan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Pada peraga selanjutnya, Gambar\_3-2 menjelaskan bagaimana *green business* diimplementasikan melalui praktik tata kelola keuangan berbasis *gree*n untuk memperoleh nilai perusahaan berkelanjutan. Pada Peraga -4 tersebut tampak bahwa proses bisnis dimulai dengan *inbound logistic.* input dalam bisnis hijau ini harus memperhatikan aspek-aspek eksplorasi sumberdaya secara bijak dengan memperhatikan mengenai sumber-sumberdaya terbarukan, pada sisi lain penekanan pada penggunaan berbagai material yang dapat didaur-ulang (*recycled matterials*) menjadi hal terpenting dan menjadi *minimum requirement business process.*

Dalam tahap *business process* pemanfaatan energi dan sumberdaya dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan beragam teknologi ramah lingkungan (*environmental friendly*) termasuk dalam aktivitas ini adalah teknologi proses yang *Low-Carbon Economy* (LCE) atau *Low-Fossil-Fuel Economy* (LFFE), yaitu aktivitas bisnis yang memberikan *output* minimal terhadap emisi *Green Houses Gas* (GHG). Sehingga output yang dihasilkan produk produk yang ramah lingkungan (*green products and services*) sehingga menghasilkan minimum *waste and scrapt*.

*Sumber: diambil dari berbagai sumber*

**Gambar 3-2.**

**Proses Bisnis yang Memperhatikan Kelestarian Sumberdaya lingkungan**

Ouput yang dihasilkan harus bisa dijual atau ada pasar outputnya, sehingga fungsi–fungsi manajemen yang dilaksanakan juga harus satu jalan dengan proses–proses sebelumnya, jadi *marketing* (*green label, usable or recycle packaging*) fungsi manajemen keuangan perusahaan (*green financing; green investment and didvidend*) juga harus memperhatikan keberlanjutan sumberdaya, sehingga perusahaan sangat diapresiasi oleh pasar, konsistensi kebijakan perusahaan (*business Policies)* yang dilakukan perusahaan pada akhirnya akan meningkatkan prestise dan kepercayaan (*trust*).

Dalam bisnis, kepercayaan adalah modal yang sangat penting, sehingga akan mendorong tingkat penyerapan produk dipasar sehingga diharapkan dalam jangka panjang volume perdagangan perusahaan dapat bertahan dan terus tumbuh dan berkembang. Apabila fihak manajemen perusahaan tidak mempertimbangkan faktor-faktor kelestarian lingkungan dan masalah sosial kemasyarakatan dalam proses pengambilan keputusan bisnisnya, maka dapat dipastikan perusahaan akan menghadapi permasalahan tekanan publik secara serius dengan isu eksploitasi dan eksplorasi sumber-sumber ekonomi tidak terbarukan secara tidak bijaksana. Dalam jangka panjang perusahaan akan menghadapi masalah *trust*, komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan sumberdaya dipertanyakan dan kepedulian terhadap masalah sosial. bisnis hijau merupakan salah satu solusi penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Praktik bisnis hijau menuntut manajemen untuk segera merubah paradigma lama menjadi paradigm baru.

Melalui **platform** baru, bisnis hijau diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang, melalui manajemen keuangan hijau. **Tujuan manajemen keuangan hijau** adalah dapat menyatukan kepentingan dari para pemangku kepentingan perusahaan, yaitu: penciptaan nilai (*value-creation*) ditujukan untuk memenuhi maksimisasi kemakmuran pemegang saham, meningkatkan kemakmuran sosialdan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam.

Teori Manajemen keuangan hijau adalah salah satu teori keuangan baru yang mampu mempertemukan *trend* proteksi atas ekplorasi sumberdaya manusia/orang, selain sumberdaya alam dan sosial, konsep yang dikembangkan dari kelemahan teori manajemen keuangan tradisional yang pada saat ini mampu memainkan peranan penting dalam hal koordinasi pengembangan ekonomi global secara berkelanjutan.

Implementasi Bisnis hijau pada dasarnya mampu membuka ruang secara paralel dengan pelaksanaan fungsi manajemen keuangan hijau. Maksimisasi nilai perusahaan dapat dicapai dengan tetap konsisten dalam fokus efisiensi biaya dan menjaga tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Sementara untuk menjaga kemakmuran sosial (*social welfares*) dapat dicapai melalui inovasi produk yang hemat energi dan sekaligus mampu mengurangi dampak negatif eksternalitas sosial. Inovasi teknologi bersih dan proses daur ulang produk mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Peluang meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan efisiensi biaya merupakan karakterisik penting bisnis hijau.

**B A B IV**

**PARADIGMA BARU KINERJA KEUANGAN BERKELANJUTAN**



**4.1 *Green finance* dan *Green Financial management***

Sejumlah fakta empiris membuktikan bahwa eksplorasi sumberdaya alam yang berlebihan dan cenderung bersifat serakah telah menyisakan potensi kesengsaraan pada generasi yang akan datang. Meskipun nilai satuan moneter saat ini (*present-value*) dari kegiatan ekonomi tersebut bernilai positif, namun dalam jangka panjang akan memunculkan sejumlah permasalahan lingkungan dan sumberdaya alam hayati dan kecenderungan usaha seperti itu tidak mampu bertahan lama. Konsep Ekonomi Hijau (*green economy*) adalah pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja yang didorong oleh kegiatan investasi publik dan swasta yang mempertimbangkan secara bijak mengenai upaya dalam mengurangi emisi karbon dan polusi, serta pada sisi lain mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya, dan mencegah hilangnya layanan keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Pertumbuhan Hijau dalam konteks ke-ekonomi-an adalah pendekatan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk membentuk proses ekonomi yang mapan sesuai dengan prinsip ekologis dan menciptakan kesempatan tambahan untuk pekerjaan dan penciptaan pendapatan sambil meminimalkan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Mengutip dari beberapa sumber, maka yang dimaksud dengan “***Green Financ*e**” adalah pendekatan strategis untuk menggabungkan sektor keuangan dalam proses transformasi menuju ekonomi rendah karbon dan hemat sumber daya, dan **dalam konteks adaptas**i terhadap perubahan iklim.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai salah satu prasyarat untuk mengurangi munculnya masalah kemiskinan, disadari atau tidak bahwa proses pengembangan ekonomi tradisonal juga sering memberikan tekanan (mengurangi dampak secara *massive* terhadap lingkungan sekitarnya) secara signifikan terhadap lingkungan, sehingga tidak membahayakan basis alami pembangunan di masa depan. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan merupakan dua tantangan terbesar pada era saat ini. Untuk memenuhi tantangan ini, strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable-economic-development*), yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesetaraan sosial sambil melestarikan lingkungan dan menanggapi meningkatnya permasalahan disekitar perubahan iklim. Sektor keuangan dengan berbagai aktor memainkan peran kunci dalam mendukung strategi Pertumbuhan Hijau seperti mendorong terciptanya proses transformasi yang diperlukan menuju ekonomi rendah karbon dan sumber energi yang dapat memanfaatkan potensi perkembangan substansial di negara-negara berkembang dan negara-negara industri baru atau *new industrial economy* (NIC).

Bukti empiris menunjukkan bahwa terutama di negara berkembang, investasi yang berkelanjutan secara ekologis dan sumber daya seringkali dibatasi oleh kurangnya dana yang tersedia. Selain itu, lembaga keuangan seringkali tidak sadar akan adanya dampak tidak langsung dari aktivitas bisnis mereka terhadap lingkungan, dimana pada akhirnya akan menghasilkan beragam kegiatan proyek ekonomi bermasalah secara sistematis serta menyebabkan banyak keputusan keuangan yang strategis tidak memperhitungkan/mengabaikan risiko kredit yang terkait dengan lingkungan. Selanjutnya, penyediaan instrumen keuangan yang tepat sebenarnya sudah cukup tersedia untuk mitigasi risiko perubahan iklim, adalah hal yang sangat proaktif dapat dilakukan sepanjang frekuensi bencana alam dan kekeringan dirasakan terus menunjukkan peningkatan secara signifikan, bahkan jika tujuan yang dinyatakan secara internasional untuk membatasi pemanasan global (*global warning*).

**4.2 Kinerja Keuangan Berkelanjutan (*sustainable financial performance*)**

Mengeksplorasi konsep ***Green Finance*** sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi kekurangan yang ada terkait dengan mitigasi risiko memungkinkan sektor keuangan memberikan kontribusi besar dalam proses transformasi menuju Ekonomi Hijau, dan dalam konteks adaptasi terhadap munculnya perubahan iklim. Permasalahan yang muncul pada sektor Ekonomi, sosial, dan lingkungan, sejatinya adalah tiga bidang yang berbeda, karena mereka memiliki karakteristik masing-masing. Namun demikian mereka berbeda tetapi bukan menutup kemungkinan bahwa ketiga masalah tersebut dapat disatukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuktikan bahwa ketiga bidang tersebut (ekonomi,sosial dan lingkungan) tadi dapat disatukan dalam satu konsep yang diberi nama “***Sustainable Finance***” atau **Keuangan Berkelanjutan**. Sebagaimana dikutip dari laman resmi OJK, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id/), *Sustainable Finance* merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada tanggal 5 Desember 2014, OJK telah menyusun mengenai Peta jalan ([Roadmap](http://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/roadmap-keuangan-berkelanjutan.pdf)) *Sustainable Finance*, peta jalan tersebut [diluncurkan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54815a6301039/ojk-dan-klhk-luncurkan-roadmap-sustainable-finance) oleh OJK berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. *Roadmap* kinerja keuangan berkelanjutan pada dasarnya berisi paparan rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan di bawah pengawasan OJK. Di dalam *Roadmap* telah dicanangkan sejumlah langkah-langkah strategis. Salah satu langkah itu adalah mengadakan payung hukum untuk kebijakan keuangan berkelanjutan dan panduan pengawasan implementasi keuangan berkelanjutan. Selain itu, akan dibuat kebijakan yang mendorong lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan *pembiayaan ramah lingkungan*.

Peluncuran *Roadmap* yang digagas oleh OJK merupakan kelanjutan dari program bertajuk perbankan hijau “***Green Banking***” yang pernah terjalin antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Bank Indonesia pada tahun 2010. tentunya saja munculnya Program *Green Banking* ini adalah suatu kemajuan dan untuk mampu memberikan pengaruh yang lebih kuat lagi maka sebaiknya konsepnya ini diperluas tidak hanya untuk perbankan, tetapi lembaga jasa keuangan. Tujuaan utama ***Sustainable Finance*** dan juga *Green Banking* adalah **mengubah paradigma** dalam pembangunan nasional dari ***Greedy Economy*** (Ekonomi Serakah) menjadi ***Green Economy*** (Ekonomi Hijau).

***Greedy Economy*** merupakan istilah dimana fokus ekonomi hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP), melakukan eksploitasi kekayaan alam, dan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada hutang. Sedangkan ***Green Economy*** merupakan perubahan pandang terhadap pembangunan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan pada unsur Tiga P yakni **People** (*sosial*), **Profit** (*economy*), dan **Planet** (*environment*). Analogi sederhananya, ***Greedy-Economy*** itu ibarat tubuh manusia yang terus mengonsumsi makanan tanpa memandang gizi dan kesehatan sehingga tubuh menjadi gemuk atau bahkan obesitas dan rentan penyakit. Sementara, ***Green Economy*** itu ibarat tubuh yang selektif memilih makanan atau minuman yang akan dikonsumsi dengan mempertimbangkan gizi dan kesehatan sehingga tubuh berkembang, tetapi tetap sehat.

Dalam Kata Pengantar buku “[Energi Bersih: Pedoman untuk Lembaga Jasa Keuangan](http://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/buku-energi-bersih.pdf)”, ketua OJK, Muliaman D Hadad menyebutkan beberapa negara maju yang terlebih dulu telah menerapkan konsep *Sustainable Finance* seperti Negara Cina, misalnya, pada tahun 2011 telah menginvestasikan US $ 45,5 milyar untuk energi rendah karbon. Negeri Tirai Bambu itu berhasil memenuhi pangsa 20,2% sebagai pemasok energi rendah karbon dari negara-negara G-20. Lalu, India mengenakan tarif pajak 15% atas penggunaan/konsumsi energi terbarukan. Besaran tarif pajak itu 50% lebih rendah jika dibandingkan dengan penggunaan energi konvensional seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Dinegara India, misalna Pada tahun 2011, sektor energi rendah karbon tercatat menunjukkan pertumbuhan tercepat kedua di antara negara-negara G-20, dimana Indonesia termasuk salah satu anggotanya.

**4.3 Landasan Aktivitas Pembangunan Ekonomi**

**Berkelanjutan**

Tentu saja Indonesia yang memiliki hutan tropis yang cukup luas di dunia serta salah satu Negara yang memiliki garis pantai terpanjang, tidak mau kalah dengan sesama anggota G-20 seperti Cina dan India. Indonesia juga memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung terwujudnya *Sustainable Development* yang salah satu agendanya adalah menurunkan emisi karbon. Hal mana dibuktikan dengan terbitnya [Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e818b0788afa/node/lt4d50fcd17b4a9/perpres-no-61-tahun-2011-rencana-aksi-nasional-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca) tentang Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca (RAN GRK). Bahkan, empat tahun sebelum RAN GRK, Indonesia telah mengadopsi *Global Reporting Initiative* (GRI) yang merupakan pedoman dalam menyusun laporan berkelanjutan untuk mendorong setiap perusahaan mengkomunikasi secara transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan atas kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Adopsi GRI itu termaktub dalam Pasal 66 ayat (2) [UU Nomor 40 Tahun 2007](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas) tentang Perseroan Terbatas.

  Selain UU Perseroan Terbatas, melalui Pasal 68 [UU Nomor 32 Tahun 2009](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/nprt/1060/uu-no-32-tahun-2009-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peran swasta dalam mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial juga lebih dipertegas. “Upaya untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan, khususnya untuk energi bersih dan energi terbarukan (*renewable-resourches*) akan terus dilakukan seiring dengan tantangan Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi karbon.

**4.4 Roadmap Kinerja Keuangan Berkelanjutan**

*Roadmap* strategis *Sustainable Finance* mencakup pada tiga bidang area, yakni: (i) peningkatan *supply* pendanaan ramah lingkungan hidup; (ii) peningkatan Permintaan (*demand*) bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup; dan (iii) peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan. Untuk melaksanakan tiga rencana kerja strategis tersebut, *Roadmap* membagi dua tahapan.

1. **Tahap-Pertama**, pentahapan jangka Menengah (2015-2019) yakni penguatan keuangan berkelanjutan yang difokuskan pada kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan serta kompetensi SDM pelaku industri jasa keuangan, pemberian insentif serta koordinasi dengan instansi terkait.
2. **Tahap Kedua,** Jangka Panjang(2020-2024) yakni kegiatan yang difokuskan pada integrasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank dan pembangunan sistem informasi terpadu keuangan berkelanjutan. Merujuk pada rincian jangka menengah tersebut adalah penekanan tentang perlunya kerangka dasar pengaturan *Sustainable Finance*. Lebih spesifik tabel rencana kerja Keuangan berkelanjutan dalam *Roadmap* menyebutkan perlunya aturan yang menjadi payung kebijakan *Sustainable Finance*. Diskusi mengenai payung hokum, tentunya merujuk pada peraturan perundang-undangan level undang-undang. Dalam *Roadmap,* beberapa kali memang disebutkan undang-undang lingkungan hidup, tetapi tidak spesifik menunjuk pada [UU Nomor 32 Tahun 2009](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/nprt/1060/uu-no-32-tahun-2009-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertanyaannya, apakah UU Nomor 32 Tahun 2009 dirasa cukup untuk menjadi payung hukum? Sejauh penelusuran yang dilakukan*,* tidak ada satupun istilah keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Sebagai fondasi, *beleid* tersebut hanya menyebut istilah “**Pembangunan Berkelanjutan**” yang didefinisikan “*upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan*”.

**4.5 Pembangunan berkelanjutan atau ekonomi berkelanjutan**

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa sangat sulit untuk menunjukkan secara eksplist definisi keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dalam landasaan hukum yang dimaksud (UU Nomor 32 Tahun 2009) sepertinya dirasa cukup sebagai payung hukum oleh pemerintah. Hal tersebut terlihat dengan tidak adanya RUU yang secara khusus berkaitan dengan *Sustainable Finance* dalam daftar 160 RUU [Program Legislasi Nasional](http://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list) (prolegnas) DPR periode 2015-2019. Dengan demikian, Roadmap hanya mencanangkan pembentukan peraturan pada level pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup, asumsinya adalah UU Nomor 32 Tahun 2009.  Namun begitu, dukungan legislatif sebagai lembaga representasi seluruh rakyat Indonesia tetap dibutuhkan agar Roadmap *Sustainable Finance* dapat terwujud sesuai rencana dan harapan. Pada akhirnya, yang patut diingat dan dijaga adalah tujuan hakiki dari *Sustainable Finance* yakni keseimbangan tiga P: *profit, people, dan planet*.

Teori Manajemen Keuangan Hijau (*green financial management*) sepenuhnya mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan, manajemen keuangan, artinya hijau sebenarnya melindungi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara lestari, berdasarkan pada organisasi rasional dan koordinasi pergerakan dana bisnis dan hubungan keuangan antara pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tujuan untuk mencapai manfaat ekonomi, sosial dan ekologi dari kesatuan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Aktivitas pengelolaan dana yang diminta perusahaan seharusnya tidak hanya mengikuti aturan ekonomi pasar, tapi juga harus mengikuti hukum lingkungan ekologi, secara sadar mengkoordinasikan dana perusahaan pengembangan hubungan antara olahraga dan lingkungan untuk memungkinkan perusahaan, sumber daya sosial, dan ekologi. aspek pembangunan terkoordinasi, mencapai 'win-win'.

        Pengenalan konsep pembangunan berkelanjutan dan pembentukan konsep pengelolaan keuangan hijau, esensinya adalah meminta manajer bisnis dan staf perusahaan dan mendorong gagasan perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan terkait bisnis. kelompok, termasuk nasional, investor, kreditor, unit terkait, kepentingan pelanggan.

        Pengelolaan keuangan *Green Management Theory* sebagai konsep yang relatif baru, teori dan praktiknya harus ada pengembangan dan penyempurnaan proses pada tahap ini dalam pelaksanaan kursus manajemen keuangan *Green* **akan menghadapi serangkaian masalah, sebagai berikut**:

**Pertama,** ekonomi pasar dalam hukum nilai terhadap keseimbangan ekologi sosial yang relevan, perlindungan lingkungan hampir tidak efektif. Karena ekonomi pasar adalah penekanan pada kepercayaan diri dan kelompok kepentingan perilaku, sementara sumber daya lingkungan hidup sulit untuk mendefinisikan hak kepemilikan, yang membuat lingkungan sosial dan ekologi, efisiensi produksi sosial dengan kontradiksi antara individualitas.

**Kedua,** manfaat lingkungan sulit diukur. Faktor lingkungan dan sumber daya alam, sulit untuk mendefinisikan hak kepemilikan, dan indikator penilaian ekonomi tidak sebanding dengan yang relevan, membuat akuntansi hijau dan pengelolaan keuangan menjadi hijau yang sulit. Jika Anda ingin pengukuran manfaat lingkungan yang dikonversi, dimensi terpadu dengan ukuran tindakan moneter hemat biaya, sekarang tampaknya sulit dicapai, sangat rumit.

**Ketiga**, kenaikan biaya bisnis. Pengelolaan keuangan perusahaan hijau terikat untuk meningkatkan biaya bisnis, sementara manfaat lingkungan yang sesuai sulit untuk menutupi biaya yang terkait, biaya lingkungan untuk diteruskan kepada konsumen, sehingga melemahkan daya saing produk perusahaan di pasar. Bagi negara-negara berkembang, karena keterbelakangan ilmiah dan teknologi, daya saing internasional produk mereka sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan, apalagi jika penerapan kembali kebijakan lingkungan dalam pengelolaan keuangan hijau dan juga mempertimbangkan intgrasi masalah lingkungan ke dalam biaya produksi akan lebih tidak menguntungkan bagi daya saing produknyahingga mempengaruhi ekspor negara-negara berkembang.

**Keempat,** dukungan sosial saja tidak cukup. Saat ini pemerintah mengutamakan penggunaan data dan informasi lingkungan untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang relevan untuk memperbaiki lingkungan, namun mengandalkan kekuatan hukum tidak mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan untuk membentuk kekuatan pendorong yang kuat, hanya dengan jangkauan yang luas. tekanan publik untuk memaksa perusahaan mempublikasikan data dan informasi lingkungan mereka.

**Kelima,** penerapan teori pengelolaan keuangan hijau (*green finance management*) adalah menyesuaikan dengan trend semua sumber daya manusia, perlindungan lingkungan, teori teori manajemen keuangan tradisional sebagai tantangan dan pembangunan.

Agar kelestarian sumberdaya alam hayati dapat tetap dipertahankan dan dilestarikan, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus aada keberanian untuk segera mungkin teori manajemen keuangan hijau dapat diterapkan pada aktivitas ekonomi riil perusahaan, namun demikian perlu dilakukan beberapa tindakan, diantaranya perusahaan dalam pengembangan tujuan operasional, perlu mempertimbangkan sumber daya dan keseimbangan lingkungan dan keseimbangan lingkungan. Karena kenaikan konsumsi produk yang sangat memperhatikan kelestarian lingkungan (g*reen labeling*), sehingga ide konsumen bergerak menuju produk hijau (*green product*), dan semakin pening dan strategis, yang mensyaratkan sumber daya perusahaan dan isu lingkungan harus disertakan dalam agenda agar hijau menjadi sumber keuangan.

## ****BAB V****

## ****SIMPULAN****



FENOMENA ***GREEN BUSINESS*** adalah sebuah konsep atau paradigma baru dalam dunia bisnis. Dalam *green business* (bisnis yang ramah dan peduli terhadap kelestarian lingkungan alam) mengacu pada konsep keseimbangan antara unsur-unsur ekonomi, beragam aspek sosial kemasyarakatan dan juga kelestarian lingkungan alam. Implementasi model *green business* ini adalah bagaimana manajemen mampu menterjemahkan, memilih dan mentransformasikan beragam input menjadi output yang ramah terhadap lingkungan, seperti penggunaan kertas yang efesien (*paperless/paper-saving)*; hemat energi; minimisasi penggunaan *carbon*; bagaimana menghantarkan produk yang dihasilkan kepada para konsumen kita dengan kemasan yang menarik serta mudah didaur ulang, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah baik bagi para konsumen kita maupun bagi perusahaan itu sendiri.

Melalui implementasi *green business* ini diharapkan tujuan jangka panjang, apakah itu tujuan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan dapat direalisasikan. Oleh karena itu, konsep *green business* pada dasarnya akan mampu memelihara bahkan meningkatkan nilai perusahaan melalui implementasi *green financial management* yang memperhatikan terhadap lingkungan lestari. *Green financial management* dapat diimplementasikan melalui *green based investment;* mencari sumber pendanaan yang peduli terhadap lingkungan atau *green financing*/ *fund rise* danpada akhirnya bagaimana membuat kebijakan distribusi *earnings* yang tidak hanya *stockholders oriented* tapi juga para pemangku kepentingan dan lingkungan sekitarnya atau *green dividend/distribution.*

Pada akhirnya, implementasi *green financial management* *arenas* meliputi: *green-finance; green–based-investment dan green-dividend/earnings* akan mampu mensinkronisasikan orientasi investasi; pendanaan dan orienasi distribusi *earning* terhadap komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan. Konsep tersebut dapat dipercaya akan mampu memiliki dampak positip terhadap perusahaan dan dalam jangka panjang akan mampu meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

**Daftar Pustaka**

Aras, G. dan D. Crowther (2013). "Sustainable Practice : The Real Triple Bottom Line." The Governance of Risk **5**: 1-18.

Arifin, Z. (2005). Teori Keuangan & Pasar Modal. Yogyakarta, Ekonisia.

Brealey dan Myers (2000). Principles of Corporate Finance. New York, McGraw Hill.

Bryson, J. (2001). Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial, Edisi Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Djajadiningrat, S. T., Y. Hendriani dan M. Famiola (2014). Green Economy. Bandung, Rekayasa Sains.

Djohanputro, B. (2008). Manajemen Keuangan Korporat. Jakarta, PPM.

Dockery, E., W. E. Herbert dan K. Taylor (2000). "Corporate Governance, Managerial Strategies and Shareholder Wealth Maximisation: A Study of Large European Companies." Managerial Finance **26**(9): 21-35.

Earnhart, D. dan L. Lizal (2006). "Effects of ownership and financial performance on corporate environmental performance." Journal of Comparative Economics **34**: 111-129.

Elkington, J. (1997). Cannibal with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford, UK, Capstone.

Faisal Afiff (2012) Rangkaian Kluster I Dare to Think Universitas Bina Nusantara, (UBINUS) Jakarta. 2012.

Fama, E. F. (1978). "The Effects of a Firm's Investment and Financing Decisions on the Welfare of Its Security Holders." The American Economic Review **68**(3): 272-284.

Fauzi, Hasan, Svensson, Goran, Azhar dan A. R. (2010). "Triple Bottom Line as Sustainable Corporate Performance: A Proposition for the Future." Sustainability **2**: 1345-1360.

Filbeck, G. dan R. F. Gorman (2004). "The Relationship between the Environmental and Financial Performance of Public Utilities." Environmental and Resource Economics **29**: 137–157.

Freeman, R. (1984). Strategic Management: A Stakeholder’s Approach, Pitman, Boston, MA. .

Gago, R. F. dan M. N. Antolin (2004). "Stakehokder Salience In Corporate Environmental Strategy." Corporate Governance **4**(3): 65-76.

Gaver, J. J. dan K. M. Gaver (1993). "Additional Evidence on the Association Between the Investment Opportunity Set dan Corporate Financing, Dividend, and Compensation Policies." Journal Accounting & Economics **16**: 125-160.

Handoko, S. (2012). "Model Pengembangan Green Bussiness melalui Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia." Aset **14**(11): 75-82

Hansen dan M. M. Mowen (2009). Akuntansi Manajerial Salemba Empat.

Hellmann, T. (2005). "Entrepreneurship in the Theory of the Firm : the process of obtaining resources. ." Retrieved 31 Januari, 2015, from website: http://strategy.sauder.ubc.ca/hellmann.

<http://www.academia.edu/23087926/Strategi_Peningkatan_Nilai_Perusahaan_melalui_Investasi_Berbasis_Green_Strategy_Of_Increasing_Value_Firm_With_Green_Based_Investment> M. Nur Utomo. Undip Semarang didownload Pebruary16th, jam 16.00.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56533b0576d41/isustainable-finance-i--mengubah-paradigma-serakah-menjadi-hijau>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56533b0576d41/isustainable-finance-i--mengubah-paradigma-serakah-menjadi-hijau>

<http://www.kompasiana.com/gloriafransisca/pembangunan-nasional-berbasis-green-economy_54f6dcfea33311ea608b4ae6>.

<https://www.obsessionnews.com/ekonomi-bisnis/ojk-dorong-industri-jasa-keuangan-perbesar-pembiayaan-sektor-energi/>

Husnan, S. dan E. Pudjiastuti (1994). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Yogyakarta, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN.

Indriani, E. dan S. Wahyudi (2013). "Study of Effectiveness Investments with Social Commitment towards Corporate Value Creation: In the Context of Structure and Mechanism Corporate Governance." Research Journal of Finance and Accounting **4**(5).

Ja’far, S., Muhammad dan D. A. Arifah (2006). Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan, Manajemen Lingkungan Proaktif dan Kinerja Lingkungan Publik Environmental Reporting. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.

Jensen, M. C. (2001). "Value Maximization, Stakeholder theory, and the Corporate Objective Function." European Financial Management **7** (3): 297-317.

Jensen, M. C. dan W. H. Meckling (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure " Journal of Financial Economics **3**(4): 305-360.

Keown, A. J. (2004). Prinsip-prinsip dan Aplikasi Manajemen Keuangan. Jakarta, Penerbit Indeks

Keown, A. J. (2008). Manajemen Keuangan : Prinsip dan Penerapan, Indeks.

Mainardes, E. W., H. Alves dan M. Raposo (2012). "A model for stakeholder classification and stakeholder relationships " Management Decision **50**(10): 1861-1879

Martin Stuebs, J. dan L. Sun (2014). "Corporate Governance and Environmental Activity." Advances in Environmental Accounting & Management **5**: 81-113.

Martin, J. D., Keown, A. J, Petty, J. William, J. Scott dan D. F. (1994). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Jakarta, Edisi Kelima, Raja Grafindo Persada

Molina-Azorın, J. F., E. Claver-Cortes, M. D. L. pez-Gamero dan J. J. Tarı (2009). "Green management and financial performance: a literature review." Management Decision **47**(7): 1080-1100

Mutaminah dan Siyatimah (2012). Model Pengembangan Green Business untuk Peningkatan Kinerja Keuangan dan Kinerja Pasar. Forum Manajemen Indonesia. Yogyakarta.

Myers, S. C. dan N. S. Majluf (1984). "Corporate Financing And Invesment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have " Journal of Financial Economics **13**: 187-221.

Nannette Lindenberg. 2014 Definition of Green Finance. German-Development Institute.

Nations, U. (2001). Environmental Management Accounting Procedures & Principles. Newyork.

Porter & Kramer, M.R. 2011. Creating Share Value. Harvard Business Review. Januari-Pebruari 2011 USA

Purnomo, P. Karin, Widianingsih dan L. Patricia (2012). "The Influence Of Environmental Performance On Financial Performance With Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure As A Moderating Variable: Evidence From Listed Companies In Indonesia." Society Of Interdisciplinary Business Research **1**(1).

Rakimsyah, L. A. dan B. Gunawan (2011). "Pengaruh keputusan Investasi, Keputusan Pendaanan, Kebijakan Deviden dan Suku Bunga Terhadap Nilai Perusahaan." Jurnal Investasi **7**(1): 31-34.

Sarah dan Peter (2000). "The Relationship Between Environmental Disclosures And Financial Performance: An Empirical Study Of US Firms." Eco-Management And Auditing **7**(4): 155-164.

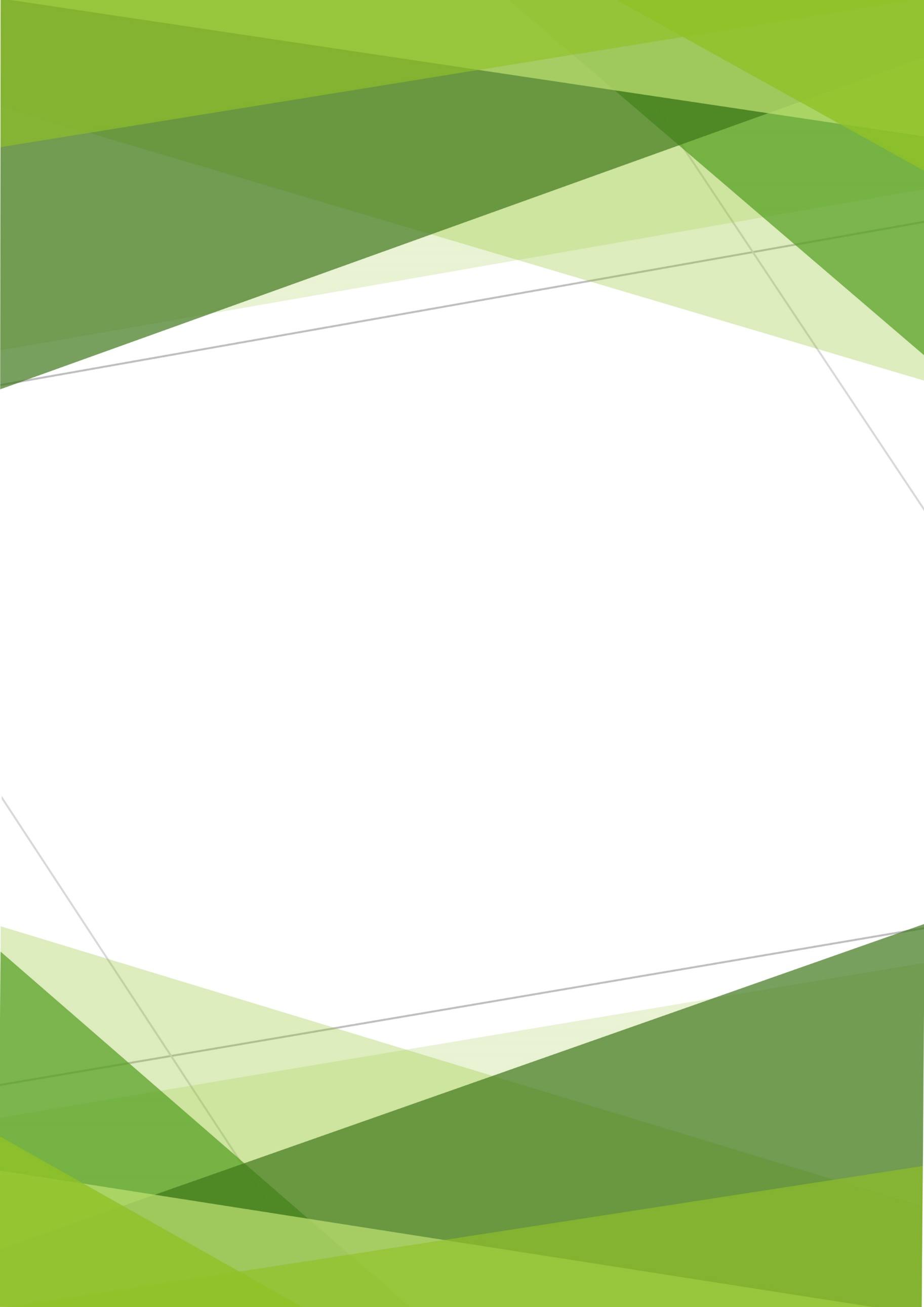
Sartono, R. A. (2012). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta, BPFE.

Sarumpaet, S. (2005). "The Relationship Between Environmental Performance And Financial Performance Of Indonesian Companies." Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra **7**(2).

Smith, C. W. dan R. L. Watts (1991). "The investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies." Journal of Financtal Economics **32**: 263-192.

Tambunan, S. T. B. (2007). "Kerangka Kerja Penilaian Investasi Lingkungan (Environmental Performance Appraisal)." Jurnal Teknik Industri **9**(2): 152-160

Wintoro, Djoko. (2012). "Eksplorasi Tujuan Manajemen Keuangan Bisnis Hijau." Jurnal Keuangan dan Perbankan **16**(1): 27-26.



Apa yang disampaikan dalam buku ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu terutama mengenai konsep tanggung jawab lingkungan dan juga kelestarian lingkungan alam hayati dari sebuah perusahaan. Konsep dan pengalaman empiris sama sama mendukung bahwa pencapaian tujuan perusahaan yakni maksimisasi kesejahteraan para pemilik perusahaan terakselerasi oleh adanya keseimbangan perusahaan dalam memperhatikan lingkungan hijau dan lingkungan lestari akan membantu mendorong perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dan menjamin adanya dukungan kelestarian sumberdaya lingkungan yang berkelanjutan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut penting dalam memberikan penjelasan secara kuantitatif mengenai *corporate finance behavior*. Bagi ***para akademisi*** atau ***mahasiswa*** baik ***program Sarjana***, ***Magister*** maupun ***Doktor*** kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan ***kontribusi rujukan*** eksplanasi yang memadai terkait dengan pembuktian mengenai kondisi KONSTELASI ANTARA MANAJEMEN DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS) pada perusahaan terbuka di Indonesia juga terkait dengan masalah signal diterima atau tidaknya perusahaan ditengahtengah masyarakat yang mana hal ini akan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha dan pembentukan citra baik perusahaan dimata publik.